

KOORDINASI PEMERINTAHAN DALAM PENURUNAN ANGKA PENGANGGURAN DI KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Kharisma Ananda

NPP. 32.0931

Asdaf Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: kharismaananda83@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Fernandes Simangunsong, S.STP, S.AP, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *There is a gap between the government's policy goals to create job opportunities and the reality on the ground. Nationally and in Southeast Sulawesi Province, unemployment rates have decreased, but Kendari City has experienced an increase, making it the area with the highest unemployment rate in the province. **Purpose:** This study aims to understand and analyze government coordination in reducing the unemployment rate in Kendari City, Southeast Sulawesi Province. **Methods:** This research employs a qualitative descriptive method based on Hasan's theory. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation, with data analysis conducted through data reduction, information presentation, and drawing conclusions. Informants involved in the study include the Head of the Kendari City Manpower and Industry Office, the Secretary of the same office, Functional Officers in Placement and Workforce Training, Functional Officers in Industrial Relations and Social Security, the Head of the Kendari City Education and Culture Office, entrepreneurs, training centers, and unemployed community members. **Result:** The results indicate that government coordination in reducing unemployment in Kendari City has been carried out across several key aspects. Coordination occurs between the Manpower and Industry Office, private companies, training institutions, and the community. However, several obstacles remain, such as limited information accessibility for the community, low work experience, the influx of job seekers from outside the area, and uneven distribution of job opportunities. Efforts to overcome these obstacles include skill training programs, provision of registration services for AK-1 cards, job fairs, active partnerships with companies and training institutions, and the optimization of online platforms. **Conclusion:** Government coordination in reducing unemployment has been effective so far. All indicators show that the local government, particularly the Manpower and Industry Office, has carried out integrated coordination efforts with various stakeholders from both the government and private sectors. However, further evaluation and improvement of existing programs are necessary, as in 2024 Kendari City still has the highest unemployment rate in Southeast Sulawesi Province.*

Keywords: *Government Coordination, High Unemployment Rate, Lack of Job Opportunities, Kendari City*

ABSTRAK

Permasalahan (GAP) Adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan dengan realita yang terjadi di lapangan. Terlihat dari data tingkat pengangguran secara nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami penurunan, sedangkan Kota Kendari justru mengalami peningkatan, menjadikannya daerah dengan tingkat pengangguran tertinggi di provinsi tersebut. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana koordinasi pemerintahan dalam penurunan angka

pengangguran di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori oleh Hasan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian informasi dan penarikan kesimpulan. Adapun informan dalam penelitian yang dilakukan penulis yaitu melibatkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari, Pegawai Fungsional Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja, Pegawai Fungsional Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari, Pengusaha, Balai Pelatihan, dan Masyarakat Pengangguran. **Hasil/Temuan:** hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi pemerintahan dalam penurunan pengangguran di Kota Kendari telah berjalan pada sejumlah aspek penting, koordinasi dilakukan antara Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dengan perusahaan swasta, lembaga pelatihan, dan masyarakat. Namun, masih terdapat beberapa hambatan, seperti keterbatasan informasi yang dapat diakses masyarakat, rendahnya pengalaman kerja, masuknya pencari kerja dari luar daerah dan belum meratanya distribusi peluang kerja. Upaya mengatasi hambatan tersebut dilakukan melalui pelaksanaan pelatihan keterampilan kerja, pemberian layanan pendaftaran kartu AK-1, pelaksanaan job fair, kemitraan aktif dengan perusahaan dan lembaga pelatihan, serta optimalisasi platform daring. **Kesimpulan:** Koordinasi pemerintahan dalam penurunan angka pengangguran telah berjalan baik hingga saat ini. Seluruh indikator ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah, khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, telah melakukan upaya koordinasi secara terpadu dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dari sektor pemerintahan maupun swasta. Namun masih diperlukan evaluasi dan peningkatan dari program yang telah ada, karena pada tahun 2024 angka pengangguran di Kota Kendari masih menjadi yang tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kata Kunci: Koordinasi Pemerintahan, Tingginya Tingkat Pengangguran, Kurangnya Lapangan Pekerjaan, Kota Kendari

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seluruh warga negara memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan serta menjalani kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara berkewajiban memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan kesempatan yang sama dalam dunia kerja dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar. Namun, pada kenyataannya pengangguran masih menjadi perhatian utama di seluruh negara di dunia, terutama di negara-negara berkembang. (Syarif, M., 2024) menjelaskan bahwa banyaknya lulusan sekolah setiap tahun, baik dari tingkat menengah maupun perguruan tinggi, berdampak pada peningkatan angkatan kerja. Namun, peningkatan tersebut tidak diiringi dengan terbukanya kesempatan kerja, sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran. (Dhea Hervina Subiyakta, 2019) juga berpendapat bahwa tingginya angka pengangguran di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh minimnya lapangan kerja, tetapi juga oleh ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia industri. Di Indonesia, pengangguran masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan ekonomi, terutama di tingkat daerah. Kota Kendari, sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara justru menunjukkan angka pengangguran yang cenderung meningkat, berikut merupakan data tingkat pengangguran terbuka menurut kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Tabel 1. 1
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021-2024

Wilayah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)			
	2021	2022	2023	2024
Buton	4,74	2,99	2,48	2,95
Muna	4,97	3,11	3,27	3,78
Konawe	4,56	2,73	3,09	2,95
Kolaka	3,62	4,17	3,36	2,59
Konawe Selatan	2,14	2,95	3,12	2,76
Bombana	3,17	1,47	1,16	1,43
Wakatobi	2,30	3,53	2,73	3,02
Kolaka Utara	3,18	2,86	2,24	1,64
Buton Utara	3,00	2,10	1,93	2,13
Konawe Utara	3,36	2,01	2,76	2,40
Kolaka Timur	3,44	2,22	2,18	2,15
Konawe Kepulauan	1,83	1,85	1,59	1,51
Muna Barat	2,84	2,40	2,22	2,06
Buton Tengah	3,77	2,63	2,50	2,84
Buton Selatan	3,92	4,18	4,33	3,48
Kota Kendari	5,19	5,23	5,18	5,67
Kota Baubau	6,87	5,39	4,17	3,99
Sulawesi Tenggara	3,92	3,36	3,15	3,09

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara 2024, Diolah Penulis 2024

Berdasarkan tabel 1.1, Kota Kendari selama periode 2021 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang relatif kecil namun tetap mencerminkan dinamika kondisi ketenagakerjaan di daerah tersebut. Pada tahun 2021, TPT tercatat sebesar 5,19%, kemudian mengalami sedikit peningkatan menjadi 5,23% pada tahun 2022. Penurunan kembali terjadi pada tahun 2023 ke angka 5,18%, yang menunjukkan perbaikan meskipun sangat tipis. Namun, pada tahun 2024 terjadi lonjakan yang cukup signifikan menjadi 5,67%, yang merupakan angka tertinggi dalam periode empat tahun terakhir. Hal ini menandakan adanya permasalahan struktural yang lebih dalam, salah satunya adalah belum optimalnya koordinasi antar lembaga pemerintahan dalam penanganan isu ketenagakerjaan. Seperti dalam (Heriana & Irawan, 2024) mengatakan bahwa ketidaksesuaian antara peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan realisasi penyerapan tenaga kerja di Kota Kendari menjadi indikator lemahnya koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan tenaga kerja lokal.

Secara global, pengangguran tidak hanya menunjukkan lemahnya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengindikasikan ketidak efisienan dalam pengelolaan sumber daya manusia. (Moridian, 2025) menjelaskan bahwa pengangguran adalah fenomena penting yang memengaruhi semua perekonomian, terutama selama krisis seperti pandemi COVID-19, dan salah satu faktor penentunya adalah efektivitas ukuran pemerintah dalam mendistribusikan belanja publik untuk menciptakan lapangan kerja. Di Kota Kendari, meskipun berbagai program pelatihan kerja dan rekrutmen telah dilakukan oleh pemerintah, kenyataannya belum mampu menurunkan angka pengangguran secara signifikan. (Rowa, 2021) mengartikan

pemerintah sebagai suatu aktivitas, proses dan institusi yang terbentuk atas dasar kesepakatan warga negara sebagai cerminan dari harapan, kebutuhan, dan keinginan warganegara untuk mewujudkan hidup bersama yang tertib dan maju, agar setiap orang dapat menjalani kehidupannya secara nyaman dan wajar.

Kondisi ini mencerminkan pentingnya pendekatan koordinasi dalam pelaksanaan program ketenagakerjaan. Dalam konteks negara berkembang, koordinasi lintas sektor menjadi krusial untuk menjembatani kesenjangan antara ketersediaan lapangan kerja dan kompetensi tenaga kerja. (Shashi Kumar, 2022) menekankan bahwa pengangguran struktural terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki tenaga kerja dengan kebutuhan dunia kerja, yang menuntut adanya pendekatan multi-sektoral dalam penyelesaiannya. Maka dari itu, upaya penurunan angka pengangguran tidak cukup dilakukan secara sektoral oleh satu lembaga, melainkan harus melibatkan koordinasi antarinstansi pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Studi serupa di Uzbekistan menunjukkan bahwa peningkatan sektor industri padat karya yang dikombinasikan dengan reformasi struktural dan program pelatihan tenaga kerja mampu menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru. (Doniyorova, 2022) menyebutkan bahwa penciptaan sistem kewirausahaan dan pelatihan berbasis keterampilan di sektor tekstil berhasil menciptakan lebih dari 378 ribu lapangan kerja tambahan dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa pengangguran dapat ditekan secara signifikan melalui integrasi kebijakan antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pelatihan.

Pengangguran bukan hanya sekadar dampak dari kurangnya lapangan kerja, tetapi juga akibat minimnya perencanaan dan koordinasi antar sektor dalam pengembangan ekonomi (Iqbal, 2022). Hal ini sejalan dengan kondisi di Kota Kendari, di mana meskipun terdapat berbagai program dan kebijakan dari pemerintah yaitu *The Strategic Apex*, sebagai manajer tingkat puncak atau "*Top Management*" untuk di daerah adalah Kepala Daerah dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Wasistiono & Simangunsong, 2020). Namun masih lemahnya koordinasi dan kurangnya sinkronisasi antar instansi menyebabkan hasilnya tidak maksimal.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengangguran tidak hanya menjadi persoalan ekonomi, tetapi juga masalah tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimana koordinasi pemerintahan di Kota Kendari dapat berfungsi secara efektif dalam menurunkan angka pengangguran. Penelitian ini penting untuk mengetahui sejauh mana mekanisme koordinasi berjalan, faktor-faktor yang mendukung dan menghambatnya, serta upaya strategis yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam koordinasi.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Permasalahan pengangguran di Kota Kendari menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara tujuan kebijakan pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerja dengan realita yang terjadi di lapangan. Khususnya dalam kurun waktu 2021–2024. Meskipun data tingkat pengangguran secara nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami penurunan, Kota Kendari justru mengalami peningkatan, menjadikannya daerah dengan tingkat pengangguran tertinggi di provinsi tersebut. Meskipun berbagai program ketenagakerjaan telah dirancang, seperti pelatihan keterampilan, *job fair*, hingga kerja sama dengan sektor swasta, tingkat pengangguran di Kota Kendari justru menjadi yang tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara selama beberapa tahun terakhir. Fakta ini mencerminkan adanya ketidakefektifan dalam implementasi kebijakan yang seharusnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan pekerjaan. Kesenjangan tersebut merupakan masalah krusial yang perlu segera di tangani dan dilakukan penelitian.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini sebelumnya memiliki beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai pedoman dan inspirasi, baik dalam konteks masalah pengangguran maupun konteks program dan kegiatan pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Penelitian (Rezky Wulan Ramadhani, 2022) yang berjudul Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Pengangguran di Kota Banda Aceh dalam Perspektif Ekonomi Islam, menemukan bahwa meskipun kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah sudah dilaksanakan, efektivitasnya masih kurang. Program-program yang dijalankan pemerintah untuk mengatasi pengangguran, seperti pelatihan bagi para penganggur yang sesuai dengan perspektif ekonomi Islam dan tujuan ekonomi Islam, berfokus pada kesejahteraan manusia. Namun, meskipun ada upaya tersebut, hasilnya belum optimal dalam menurunkan tingkat pengangguran.

Penelitian (M Dedi Suardi, 2020) yang berjudul Peran Pemerintah Dalam Mengurangi Pengangguran Melalui Pelatihan (Studi Kasus Di Balai Latihan Kerja UPTD Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Prov. Nusa Tenggara Barat Thn 2016/2019) menemukan bahwa Balai Latihan Kerja (BLK) Mataram telah berjalan dengan baik, yang terlihat dari program pelatihan yang diselenggarakan di sana yang cukup efektif. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh BLK, terutama terkait jumlah sumber daya manusia. Dari total 14 instruktur, hanya 12 orang yang aktif, yang masih belum sebanding dengan beban tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing karyawan.

Penelitian (Rizka Nurhidayanto, 2021) yang berjudul Peran Balai Latihan Kerja Ponorogo Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran menemukan bahwa Balai Latihan Kerja (BLK) Ponorogo memainkan peran penting dalam membantu pemerintah menurunkan tingkat pengangguran. Dalam empat tahun terakhir, BLK Ponorogo telah melatih 5.434 peserta, dan dari jumlah tersebut, sebanyak 3.816 alumni berhasil terserap ke dunia kerja dengan persentase 70,2%. Namun, BLK Ponorogo juga menghadapi beberapa kendala, seperti kekurangan tenaga instruktur, kurang memadai sarana dan prasarana, serta adanya bagian yang kurang kompeten.

Penelitian (M. Yusuf, 2023) yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Dalam Mengatasi Pengangguran di Luwu Timur, menemukan bahwa pertama Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dalam menangani pengangguran di Luwu Timur telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut. Hal ini mencakup penyelenggaraan program atau pelatihan bagi tenaga kerja serta pencarian informasi lowongan pekerjaan oleh Dinas Tenaga Kerja yang sesuai dengan bakat dan minat tenaga kerja yang telah mengikuti pelatihan selama 3 bulan. Kedua kendala yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dalam menangani pengangguran di Luwu Timur antara lain minimnya anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, tingginya jumlah pengangguran, serta kurangnya lapangan pekerjaan, yang menjadi hambatan dalam menekan angka pengangguran. Ketiga untuk mengatasi kendala tersebut, Dinas Tenaga Kerja mengadakan program atau pelatihan, seperti pemasaran tempat kerja/job canvassing. Selain itu, mereka bekerja sama dengan perusahaan dan sektor-sektor lain, seperti pertambangan, pariwisata, dan pertanian, yang saat ini menjadi bagian dari upaya Kabupaten Luwu Timur untuk mengurangi pengangguran.

Penelitian (Wilian Hafiz, 2022) yang berjudul Peran Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Banda Aceh Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Di Kota Banda Aceh, menemukan bahwa Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Banda Aceh memainkan tiga peran utama dalam upayanya mengurangi tingkat pengangguran di kota tersebut, yaitu sebagai regulator, komunikator, dan fasilitator. Tujuan dari peran-peran ini adalah memastikan program dan kegiatan yang dijalankan untuk menekan angka pengangguran dapat dilaksanakan secara optimal. Namun, kendala yang dihadapi oleh Disnaker Kota Banda Aceh terletak pada keterbatasan anggaran dan kurangnya sumber daya manusia, yang menyebabkan pelaksanaan program dan kegiatan menjadi terhambat dan mengalami penundaan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang terletak pada fokus analisis terhadap koordinasi pemerintahan sebagai instrumen utama dalam penurunan angka pengangguran di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Berbeda dari penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh (Rezky Wulan Ramadhani, 2022) yang menitikberatkan pada analisis kebijakan dalam perspektif ekonomi Islam, atau (M. Dedi Suardi, 2020) dan (Rizka Nurhidayanto, 2022) yang lebih menyoroti efektivitas program pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK), penelitian oleh (M. Yusuf, 2022) pun berfokus pada implementasi Peraturan Daerah dalam konteks ketenagakerjaan di Kabupaten Luwu Timur, dengan pendekatan empiris namun terbatas pada implementasi regulasi, bukan pada proses koordinatif lintas sektor. Selanjutnya, (Wilian Hafiz, 2022) menelaah peran Dinas Tenaga Kerja dalam tiga fungsi utama (regulator, komunikator, dan fasilitator), namun belum menguraikan lebih dalam tentang pola koordinasi yang dibangun lintas sektor maupun peran pihak swasta dalam proses tersebut. Dibandingkan seluruh penelitian sebelumnya, penelitian ini mengangkat aspek koordinasi pemerintahan secara lebih mendalam dan sistematis, terutama dalam mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat koordinasi serta strategi konkret dalam mengatasi kendala tersebut. Selain itu, konteks lokasi penelitian di Kota Kendari, yang memiliki tingkat pengangguran tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan data BPS 2021–2024, memberikan urgensi kontekstual yang belum diangkat dalam penelitian serupa sebelumnya. Penelitian ini juga tidak hanya mengkaji kinerja satu lembaga, tetapi menyoroti keterpaduan kerja antara pemerintah, perusahaan, lembaga pelatihan, dan masyarakat sebagai bagian dari upaya kolektif penurunan angka pengangguran. Oleh karena itu, kebaruan ilmiah dari penelitian ini adalah terletak pada pendekatannya yang berorientasi pada tata kelola koordinasi lintas sektoral, yang belum menjadi fokus utama dalam studi-studi sebelumnya.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana koordinasi pemerintahan dalam penurunan angka pengangguran di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat serta upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penurunan angka pengangguran.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Menurut Simangunsong (2017), menjelaskan bahwa “metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan filsafat postpositivisme sebagai landasan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, instrument utamanya adalah peneliti, teknik pengumpulan datanya dilakukan secara triangulasi dan hasil penelitiannya lebih menekankan pada makna”. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara komprehensif keadaan yang ada, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi pemerintahan dalam penurunan angka pengangguran.

Penulis mengumpulkan data melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilaksanakan selama 21 hari di Kota Kendari, khususnya di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari. Karena keterbatasan waktu selama di lapangan, wawancara dilakukan kepada 11 orang informan dari 14 orang informan yang meliputi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari (1 orang), Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari (1 orang), Pegawai Fungsional Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja (1 orang), Pegawai Fungsional Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (1 orang), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari (1 orang), Pengusaha (1 orang), Balai Pelatihan (1 orang), Masyarakat Pengangguran (4 orang). Berikutnya observasi yang dilakukan dimana penulis ikut serta dan terlibat dalam

kegiatan secara fleksibel sesuai dengan kondisi dan situasi di lapangan serta didukung dengan pengumpulan data melalui dokumentasi secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menunjang fakta di lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Koordinasi Pemerintahan dalam Penurunan Angka Pengangguran di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan antara 6 Januari hingga 25 Januari 2025, penulis mengumpulkan informasi terkait koordinasi pemerintahan dalam penurunan angka pengangguran di Kota Kendari. Dalam pelaksanaan penelitian, penulis mengacu pada proses koordinasi menurut (Hasan, 2014) dalam karyanya Komunikasi dalam Koordinasi Pemerintahan (2014) sebagai alat analisis. Koordinasi dapat diukur keberhasilannya melalui beberapa proses menurut (Hasan, 2014) yang dapat dilihat dari 7 aspek yaitu:

Komunikasi, koordinasi yang baik dimulai dari komunikasi yang efektif. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari telah menunjukkan adanya komunikasi yang aktif dengan berbagai pihak terkait, seperti perusahaan swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Komunikasi ini dibangun melalui kegiatan formal seperti rapat koordinasi, serta media informal dan digital seperti media sosial dan aplikasi pengumuman lowongan kerja. Tujuannya adalah memastikan setiap pihak mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu, serta menciptakan sinergi dalam merancang dan menjalankan program penurunan angka pengangguran.

Kesadaran pelaksana terhadap pentingnya koordinasi, ditunjukkan melalui integrasi kegiatan koordinatif ke dalam job desk masing-masing instansi. Dinas Tenaga Kerja tidak bekerja sendiri, tetapi secara aktif menjalin kemitraan dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan sektor swasta. Tingginya pemahaman ini tercermin dalam program pelatihan seperti kursus menjahit untuk masyarakat, yang merupakan hasil koordinasi lintas sektor.

Kompetensi Partisipan, Kalender Pemerintah, dalam penelitian ini ditemukan bahwa sebagian besar pejabat di Dinas Tenaga Kerja memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya, meskipun latar belakang pendidikan mereka beragam. Kehadiran dan ketepatan waktu dalam rapat juga menjadi bukti komitmen terhadap kalender kerja, yang sangat mendukung proses perencanaan dan pelaksanaan program ketenagakerjaan.

Kesepakatan dan Komitmen, agenda formal dan pertemuan berkala telah dijadikan wadah untuk menyusun kesepakatan dan membangun komitmen bersama antar instansi. Pertemuan rutin antar instansi digunakan untuk membagi tugas dan menetapkan langkah strategis berdasarkan kondisi lapangan. Rencana kerja lima tahun dan target-target spesifik ditetapkan melalui mekanisme ini untuk memastikan setiap instansi berjalan pada arah yang selaras dalam menurunkan angka pengangguran.

Penetapan Kesepakatan oleh Pihak yang Berkoordinasi, kesepakatan yang dicapai tidak hanya bersifat lisan, tetapi juga dituangkan dalam bentuk kebijakan formal, seperti Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tenaga Kerja Lokal. Perda ini menjadi acuan bagi kegiatan-kegiatan seperti Job Fair dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang bertujuan memberikan akses keterampilan kepada pencari kerja. Implementasi kebijakan ini menunjukkan bahwa koordinasi telah menghasilkan tindakan nyata.

Insentif Koordinasi, meskipun belum ada sanksi resmi terhadap pelanggaran koordinasi, pemerintah memberikan insentif dalam bentuk fasilitas dan dukungan program. Misalnya, disediakan tempat perekrutan tenaga kerja dan dukungan promosi bagi perusahaan yang bersedia bermitra. Insentif ini menjadi motivasi tambahan bagi instansi dan mitra kerja untuk terus menjaga sinergi koordinatif.

Feedback, adanya umpan balik dari para *stakeholder* merupakan elemen penting dalam siklus koordinasi. Pemerintah menerima masukan dari perusahaan, lembaga pelatihan, dan masyarakat untuk memperbaiki dan menyesuaikan program. Beberapa kesepakatan yang tidak efektif mengalami revisi berdasarkan masukan tersebut, misalnya menyesuaikan jenis pelatihan dengan kebutuhan industri lokal agar lulusan program pelatihan lebih cepat terserap ke pasar kerja.

3.2. Faktor - Faktor Pendukung Dan Penghambat Koordinasi Pemerintahan Dalam Penurunan Angka Pengangguran di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara

Dalam pelaksanaan penelitian, terdapat sejumlah faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi koordinasi pemerintahan dalam penurunan angka pengangguran. Faktor-faktor pendukung yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi adanya dukungan anggaran dari pemerintah daerah yang memungkinkan pelaksanaan berbagai program ketenagakerjaan, seperti pelatihan kerja dan job fair. Selain itu, keterlibatan sektor swasta, seperti perusahaan yang aktif membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal, juga menjadi elemen penting dalam memperkuat koordinasi. Faktor lain yang mendukung adalah tersedianya lembaga pelatihan seperti BPVP, BLK, LKP dan PKBM yang berperan dalam peningkatan kompetensi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan guna menurunkan angka pengangguran, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi lowongan kerja secara cepat dan luas.

Koordinasi juga dihadapkan pada sejumlah hambatan yang perlu segera diatasi. Faktor penghambat utama adalah keterbatasan akses informasi oleh masyarakat, khususnya di daerah pinggiran yang belum terjangkau secara optimal oleh platform digital. Rendahnya jumlah lapangan pekerjaan dibandingkan dengan tingginya angka pencari kerja juga menjadi tantangan struktural yang menyulitkan penyaluran tenaga kerja. Selain itu, masuknya pencari kerja dari luar daerah memperbesar persaingan dan menurunkan peluang kerja bagi penduduk lokal. Kurangnya pengalaman kerja dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri lokal juga memperburuk posisi tawar pencari kerja. Serta kurangnya bantuan dari pemerintah untuk memberikan pekerjaan kepada peserta lulusan lembaga pelatihan nonformal.

3.3. Upaya Mengatasi Faktor-faktor Penghambat Koordinasi Pemerintahan dalam Penurunan Angka Pengangguran di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara

Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian telah mengimplementasikan berbagai upaya strategis, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Upaya langsung mencakup pelaksanaan program pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dari kalangan kurang mampu, penerbitan kartu pencari kerja (AK-1), serta penyelenggaraan job fair dan rekrutmen terbuka hasil kerja sama dengan perusahaan-perusahaan lokal. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan keterampilan dan membuka akses kerja yang lebih luas bagi masyarakat lokal. Selain itu, pemerintah juga memperkuat kemitraan dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) untuk menyesuaikan program pelatihan dengan kebutuhan industri yang aktual. Sementara itu, upaya tidak langsung dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan literasi digital masyarakat, serta penyebarluasan informasi lowongan kerja melalui platform daring guna menjangkau wilayah-wilayah yang sebelumnya mengalami keterbatasan akses. Pemerintah juga terus membangun kerja sama lintas sektor, termasuk dengan dunia usaha dan lembaga pendidikan, untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan. Keseluruhan upaya tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjadikan koordinasi sebagai alat utama dalam mengatasi hambatan struktural dan sosial dalam penurunan angka pengangguran.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi pemerintahan yang efektif, melalui aspek komunikasi, kesadaran, kompetensi, kesepakatan dan komitmen, penetapan kesepakatan, insentif, dan feedback, memainkan peran penting dalam menurunkan angka pengangguran di Kota Kendari. Sama halnya dengan temuan penelitian (Wilian Hafiz, 2022) yang menyatakan bahwa Dinas Tenaga Kerja memainkan peran sebagai fasilitator dan komunikator dalam mengurangi pengangguran, penelitian ini juga menemukan bahwa komunikasi yang dibangun oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari dengan berbagai mitra seperti perusahaan, lembaga pelatihan, dan masyarakat, telah menciptakan sinergi program penanggulangan pengangguran. Namun, berbeda dengan temuan (Wilian Hafiz, 2022), penelitian ini menemukan bahwa aspek koordinasi tidak hanya dilihat dari peran komunikasi semata, tetapi juga mencakup pembentukan kesepakatan formal, seperti Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tenaga Kerja Lokal, serta adanya feedback dan insentif koordinatif yang belum dikaji secara rinci dalam penelitian tersebut.

Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian (Rizka Nurhidayanto, 2022) yang menunjukkan bahwa pelatihan keterampilan kerja di BLK berdampak positif terhadap penurunan pengangguran, karena penelitian ini menemukan bahwa kemitraan pemerintah dengan LKP dan BLK menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan kompetensi pencari kerja. Akan tetapi, berbeda dengan penelitian Rizka, fokus utama penelitian ini adalah pada efektivitas koordinasi lintas sektor dalam membentuk sistem kerja terintegrasi, bukan hanya pada evaluasi efektivitas lembaga pelatihan tertentu.

Berbeda pula dengan temuan (M. Dedi Suardi, 2020) yang lebih menyoroti persoalan internal di BLK seperti kekurangan instruktur dan beban kerja yang tidak seimbang, penelitian ini menunjukkan bahwa masalah pengangguran di Kota Kendari tidak hanya berkaitan dengan internal kelembagaan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti masuknya tenaga kerja dari luar daerah dan minimnya pengalaman kerja pencari kerja lokal. Temuan ini mengindikasikan perlunya koordinasi pemerintahan yang lebih luas dan adaptif.

Sementara itu, temuan ini menolak generalisasi dari penelitian (M. Yusuf, 2022) yang menyimpulkan bahwa implementasi peraturan daerah telah sepenuhnya berjalan baik dalam menurunkan pengangguran. Dalam konteks Kota Kendari, meskipun ada Perda tentang Tenaga Kerja Lokal, implementasinya belum sepenuhnya mampu mengatasi hambatan struktural seperti ketimpangan informasi dan terbatasnya lapangan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan karakteristik wilayah dan dinamika sosial ekonomi daerah dapat mempengaruhi efektivitas suatu kebijakan.

Temuan ini juga melengkapi penelitian (Rezky Wulan Ramadhani, 2022) yang menggunakan perspektif ekonomi Islam dan menyoroti pentingnya keadilan sosial dalam kebijakan pengangguran. Penelitian ini tidak menitikberatkan pada nilai-nilai normatif, namun memberikan gambaran praktis tentang bagaimana koordinasi pemerintahan berjalan dalam konteks birokrasi dan lintas sektor untuk mencapai efektivitas kebijakan ketenagakerjaan.

Demikian, temuan dalam penelitian ini memperkaya gagasan ilmiah mengenai koordinasi pemerintahan dalam konteks penurunan angka pengangguran, baik melalui penguatan kelembagaan, kemitraan multisektor, maupun integrasi sistem informasi. Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat benang merah dengan penelitian-penelitian sebelumnya, fokus koordinasi yang menyeluruh serta konteks lokal Kota Kendari memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan studi pemerintahan daerah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana koordinasi pemerintahan dalam penurunan angka pengangguran di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, faktor-faktor

pendukung dan penghambat, serta upaya mengatasi faktor penghambat. Maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Koordinasi pemerintahan dalam penurunan angka pengangguran di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara telah berjalan baik hingga saat ini dan mencakup berbagai aspek penting seperti komunikasi yang terbuka dan dua arah, kesadaran bersama atas pentingnya koordinasi, kompetensi pelaksana yang memadai, ketaatan terhadap agenda kerja, serta kesepakatan formal yang dituangkan dalam kebijakan daerah. Proses koordinasi juga dilengkapi dengan pemberian insentif kepada pihak yang terlibat dan adanya mekanisme feedback yang digunakan untuk menyempurnakan program secara berkelanjutan. Seluruh indikator ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah, khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, telah melakukan upaya koordinasi secara terpadu dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dari sektor pemerintahan maupun swasta.

Faktor pendukung yang memperkuat efektivitas koordinasi tersebut, antara lain tersedianya dukungan anggaran, responsivitas pemerintah, keberadaan lembaga pelatihan formal dan nonformal seperti LKP dan BPVP, adanya Pusat Kegiatan Masyarakat sebagai penunjang pendidikan yang sempat tertunda, kualitas pendidikan pihak swasta, serta pemanfaatan teknologi informasi melalui media sosial untuk penyebaran informasi ketenagakerjaan. Di sisi lain, faktor penghambat yang ditemukan mencakup keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi, minimnya lapangan pekerjaan, masuknya pencari kerja dari luar daerah, rendahnya pengalaman kerja dan keterampilan pencari kerja lokal yang belum sesuai dengan kebutuhan industri, serta kurangnya bantuan dari pemerintah dalam memberikan pekerjaan kepada peserta pelatihan nonformal.

Pemerintah Kota Kendari telah melakukan berbagai langkah strategis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Upaya langsung meliputi pelaksanaan pelatihan keterampilan kerja, pemberian layanan pendaftaran kartu AK-1, pelaksanaan job fair, serta kemitraan aktif dengan perusahaan dan lembaga pelatihan. Sedangkan upaya tidak langsung mencakup peningkatan literasi digital, optimalisasi platform daring untuk penyebaran informasi lowongan kerja, serta pengembangan program pendidikan berbasis kebutuhan dunia kerja.

Keterbatasan Penelitian Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu dipahami agar menjadi pembelajaran bagi penelitian selanjutnya, yaitu keterbatasan waktu dan akses informasi dari pihak swasta maupun masyarakat umum menyebabkan data yang diperoleh lebih dominan berasal dari sisi pemerintah, sehingga perspektif dari sektor non-pemerintah masih belum tergali secara maksimal. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, sehingga hasil yang diperoleh bersifat naratif dan tidak mengukur secara kuantitatif tingkat efektivitas masing-masing proses koordinasi. Hal ini menyebabkan penilaian terhadap keberhasilan program bersifat relatif dan bergantung pada persepsi informan.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*) Penelitian lanjutan sangat diperlukan untuk mengevaluasi koordinasi pemerintahan dalam penurunan angka pengangguran di daerah lain yang memiliki karakteristik dan tingkat pengangguran yang berbeda untuk mengidentifikasi praktik koordinasi terbaik yang dapat diaplikasikan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan selama proses penelitian ini, khususnya

kepada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkait yang telah membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk materi, waktu, maupun pemikiran yang sangat berguna bagi penelitian ini. Tanpa bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Doniyorova, Matluba, et al. "Scientific basis of organization of kinds of weaving enterprises in a new system in Uzbekistan." *American Institute of Physics Conference Series*. Vol. 2789. No. 1. 2023. <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2023AIPC.2789d0020D/abstract>
- M., and Syarif M. "ANALISIS PENGARUH ANGKATAN KERJA DAN PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI KOTA KENDARI." *JPEP (Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan)* Vol 9.2 (2024): 291-300. <https://journal.uho.ac.id/index.php/jpep/article/view/892/503>
- Hasan, E. & Eva E. 2014. *Komunikasi Dalam Koordinasi Pemerintahan*. Jatinangor
- Heriana, K. M., & Irawan, F. (2024). *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Potensi*. 0832(September), Vol. 9.3, 271–296. <https://jurnal-ekonomi.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/20>
- Iqbal, J. (2022). Problem of Unemployment in India: an Emprical Study. *Journal of Xi'an Shiyong University*, Volume 18(6). <https://www.xisdxxsu.asia/V18I06-86.pdf>
- M Dedi S. 2020. "Peran Pemerintah Dalam Mengurangi Pengangguran Melalui Pelatihan (Studi Kasus Di Balai Latihan Kerja UPTD Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Prov.Nusa Tenggara Barat Thn 2016/2019)" <https://etheses.uinmataram.ac.id/1156/> M.
- Moridian, A., Radulescu, M., Usman, M., Mahdavian, S. M., Hagiu, A., & Serbanescu, L. (2025). Unemployment rate and its relationship with government size, trade, inflation, urbanization, and economic growth in Romania. *Heliyon*, 11(10). <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844024176104>
- M. Yusuf. 2023. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Dalam Mengatasi Pengangguran di Luwu Timur" <https://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7551/>
- Rezky W. R. 2022. "Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Pengangguran di Kota Banda Aceh dalam Perspektif Ekonomi Islam" <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/29056/>
- Rizka N. 2021. "Peran Balai Latihan Kerja Ponorogo Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran" <https://etheses.iainponorogo.ac.id/13421/>
- Rowa, H. (2021). Organisasi Pemerintahan dalam Teori dan Praktik. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, 1–22.
- Shashi Kumar, R. (2022). Unemployment in India: Causes. *Trends and Remedies International Journal of Economic Perspectives*, 16(7), 143–151. <https://ijeponline.com/index.php/journal/article/view/335>
- Simangunsong, F. 2017. *Metodelogi Penelitian Pemerintahan* (Cetakan II). Alfabeta, cv.
- Subiyakta, K. N. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Di Kota

Tomohon. *Journal of Development Economics (Jurnal Ekonomi Pembangunan) Volume 11 (2)*, 490–498. <https://ojs.uho.ac.id/index.php/JEP/article/view/14419/11077>

Wasistiono, S., & Fernandes Simangunsong. (2020). *Teori Pemerintahan Daerah* (Cetakan I). Universitas Terbuka.

Wilian H. 2022. “*Peran Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Banda Aceh Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Di Kota Banda Aceh*” <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/26057/>

